

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada perkembangan ilmu Hubungan Internasional kontemporer, isu-isu lingkungan telah menjadi salah satu isu yang disoroti oleh masyarakat global. Isu lingkungan merupakan isu ketiga setelah isu keamanan dan ekonomi.¹ Pada tahun 1960-an, isu lingkungan mendapat perhatian di tingkat internasional karena dampak dan risiko yang ditimbulkan meningkat secara signifikan. Pada tahun 1972, *United Nations on the Human Environment* mengorganisir pertemuan *Stockholm Conference* untuk merespon munculnya permasalahan polusi dan isu lingkungan lainnya yang terjadi pada 1960-an tersebut. Konferensi ini merupakan awal mula munculnya isu lingkungan yang melembaga dan telah memiliki prinsip-prinsip serta menyadari pentingnya peran negara dalam merespon permasalahan lingkungan.²

Berkembangnya isu lingkungan dalam politik internasional disebabkan oleh, pertama permasalahan lingkungan global yang terjadi hanya dapat dikelola secara efektif melalui kerjasama antar negara. Kedua, meningkatnya skala permasalahan lingkungan di tingkat regional seperti degradasi lahan, kelangkaan air, dan

¹ G. Porter and J. W. Brown, 1996, *Global Environmental Politics*, dalam Robert Jackson dan Georg Sorensen, 2005, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 324.

² Owen Greene, 2001, *The Globalization of World Politics: Environmental Issues* hal. 389-390 diakses dari http://www.koleggi-juridica.org/new_web/wp-content/uploads/2017/04/The-Globalization-of-World-Politics-by-John-Baylis-Steve-Smith.pdf pada 14 September 2017.

penggundulan hutan. Ketiga, adanya hubungan yang kompleks antara permasalahan lingkungan dengan perekonomian dunia.³

Isu lingkungan sendiri menjadi penting dalam hubungan internasional mengingat semakin meningkatnya permasalahan lingkungan yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, hingga keamanan negara-negara dalam dunia internasional khususnya bagi negara kepulauan dan negara kecil padat penduduk. Permasalahan lingkungan dalam berbagai aspek tersebut dapat memberikan dampak buruk bagi kehidupan manusia, khususnya adalah masalah perubahan iklim.

Perubahan iklim (*climate change*) menjadi isu lingkungan yang penting untuk diperhatikan oleh masyarakat global karena dampak yang ditimbulkannya secara tidak langsung dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti perubahan cuaca secara ekstrem, meningkatnya wabah penyakit, menurunnya produksi pertanian yang dapat meningkatkan ancaman kelaparan bagi masyarakat, langkanya sumber air bersih, rusaknya keanekaragaman hayati, hingga meningkatnya potensi bencana alam.⁴ Dampak-dampak tersebut, dalam jangka panjang akan mengancam keberlangsungan kehidupan, khususnya untuk generasi yang akan datang. Jika dikaitkan dengan ilmu Hubungan Internasional, dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim dapat mengancam keamanan suatu negara karena adanya ancaman pada suatu negara yang ditimbulkan dari naiknya permukaan air laut. Selain itu,

³ Andrew Hurrell and Benedict Kingsbury, *The International Politics of The Environment: Introduction*, diakses dari http://www.academia.edu/download/9762732/the_international_politics_of_the_environment.pdf pada 22 Agustus 2017.

⁴ Kurniatun Hairiah, dkk, 2016, *Perubahan Iklim: Sebab dan Dampaknya Terhadap Kehidupan*, hal. 15-16.

masalah perubahan iklim merupakan masalah bersama yang harus dihadapi seluruh negara karena masalah ini berkaitan dengan perubahan sistem iklim bumi yang dapat mengancam kehidupan akibat aktivitas warga dunia.

Perubahan iklim sendiri merupakan salah satu fenomena alam di mana suhu yang ada di muka bumi mengalami perubahan secara alamiah yang terjadi seiring dengan pertambahan usia bumi atau disebabkan oleh aktivitas-aktivitas yang dilakukan manusia secara sengaja atau tidak sengaja yang dapat mempercepat laju perubahan iklim khususnya aktifitas manusia pasca revolusi industri⁵ di mana penggunaan mesin-mesin bertenaga energi fosil banyak digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia itu sendiri.⁶ Penggunaan energi fosil secara berlebihan dapat menimbulkan pemanasan global (*global warming*) yang merupakan fenomena meningkatnya suhu permukaan bumi dari masa ke masa. Dampak dari perubahan iklim yang umum terjadi adalah penurunan atau peningkatan suhu udara secara ekstrem, pergeseran musim kemarau atau musim hujan yang tidak menentu, naiknya permukaan air laut, dan bencana alam seperti banjir, badai tropis, dan kebakaran hutan.⁷

Masalah perubahan iklim saat ini telah menjadi perhatian masyarakat dunia agar mendapatkan tindakan pencegahan yang lebih serius sehingga dapat meminimalisir dampak yang terjadi. Dampak perubahan iklim sendiri dapat dirasakan

⁵ Revolusi Industri dimulai tahun 1750-1850 dipelopori oleh negara Inggris dimana alat-alat industri konvensional digantikan dengan mesin-mesin bertenaga energi fosil.

⁶ WALHI Bali, 2007, *Ketika Selimut Bumi Makin Tebal: Sekilas tentang Pemanasan Global dan Perubahan Iklim* diakses dari <http://walhibali.org/lembar-informasi-no-1/> pada 22 Agustus 2017.

⁷ Ismid Hadad, 2010, *Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan*, hal. 3-4.

oleh seluruh lapisan masyarakat baik itu masyarakat di negara berkembang ataupun negara maju. Di Kiribati terdapat pulau Abanuea dan Tebua yang keduanya merupakan pulau tidak berpenghuni dan telah tenggelam pada tahun 1999.⁸ Ada pula fenomena suhu panas yang terjadi di India pada Mei 2015 yang mencapai 48 derajat Celcius.⁹ Kejadian tersebut menewaskan ribuan korban jiwa karena *heatsroke* dan dehidrasi berat. Selain itu terancamnya pulau Tuvalu dari naiknya air laut pantai mereka yang menyebabkan pemerintah Tuvalu harus meminta bantuan imigrasi bagi warganya agar bisa pindah ke Australia pada tahun 2002.¹⁰ Hal tersebut merupakan beberapa contoh dampak perubahan iklim yang dirasakan oleh masyarakat global.

Menanggapi bahaya dan dampak dari perubahan iklim tersebut, PBB membentuk kerangka kerja untuk menangani masalah perubahan iklim yakni *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Pembentukan UNFCCC diawali dari pertemuan KTT Bumi pada 1992 dan efektif berjalan pada tahun 1994 dengan tujuan awal menstabilkan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer sampai pada tingkat yang tidak membahayakan kehidupan organisme dan memungkinkan terjadinya adaptasi ekosistem. Konvensi ini ditandatangani setiap tahunnya sejak tahun 1995 dalam pertemuan yang biasa disebut *Conference of the Parties* (COP) untuk menilai perkembangan perubahan iklim global. COP sendiri

⁸ Eric L. Kwa, 2008, *Climate Change and Indigenous People in The South Pacific*, hal. 6.

⁹ Susetyo Dwi Prihadi, *Penjelasan Ilmuwan Soal Cuaca Panas Ekstrem di India* diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150528092006-199-56202/penjelasan-ilmuwan-soal-cuaca-panas-ekstrem-di-india> pada 5 April 2016.

¹⁰ National Geographic Indonesia, 2012, *Perubahan Iklim Paksa Maladewa 'Pindah' ke Australia* diakses dari <http://nationalgeographic.co.id/berita/2012/01/perubahan-iklim-paksa-maladewa-pindah-ke-australia> pada 5 April 2016.

merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam UNFCCC dengan tugas merancang upaya internasional untuk program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta bertanggung jawab untuk mengkaji ulang implementasi kebijakan yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya dan berkewajiban meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan oleh pihak yang tergabung dalam UNFCCC. Upaya yang dilakukan oleh negara untuk meminimalisir dampak perubahan iklim harus mampu memberikan dampak yang signifikan bagi iklim global untuk menyelamatkan kehidupan generasi sekarang dan generasi di masa mendatang, hal tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan mengenai lingkungan yang dilaksanakan bersama-sama oleh masyarakat global salah satunya melalui forum resmi seperti UNFCCC.

Selain melalui UNFCCC, kerjasama negara untuk menanggulangi masalah iklim global juga diwujudkan melalui kerjasama internasional di luar forum tersebut. Robert Keohane dan Joseph Nye berpendapat bahwa hubungan antar negara digambarkan dengan adanya interdependensi kompleks yang menjadikan negara-negara akan membentuk institusi internasional (organisasi internasional formal atau kebijakan yang dapat mengatur negara-negara) untuk menghadapi masalahnya bersama-sama.¹¹ Oleh karena itu negara-negara yang memiliki kepentingan sama terkait masalah perubahan iklim melakukan kerjasama dalam hal penanganan masalah iklim yang disebabkan oleh aktivitas bersama warga dunia dengan harapan

¹¹ Robert Jackson dan Georg Sorensen, 2005, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 63-64.

kebijakan yang diputuskan oleh suatu negara dapat membantu negara lainnya mencapai kepentingannya.¹²

Kerjasama internasional di luar forum UNFCCC yang terbentuk untuk mencapai kepentingannya terkait masalah perubahan iklim khususnya dalam hal keamanan negara menghadapi ancaman naiknya permukaan air laut adalah *Climate Vulnerable Forum* (CVF). CVF sebagai forum kerjasama internasional yang beranggotakan negara-negara rentan terhadap dampak perubahan iklim global berupaya meningkatkan kesadaran negara-negara lain terhadap dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim agar dapat menyelamatkan negara-negara anggotanya dari ancaman perubahan iklim. Negara-negara yang bergabung dalam forum kerjasama ini adalah negara-negara paling rentan terhadap dampak perubahan iklim khususnya dampak naiknya permukaan air laut. Karena memiliki kepentingan yang sama maka negara-negara CVF membentuk institusi formal yang dapat membantu menyampaikan suara masing-masing negara ke forum internasional agar kepentingan mereka akan permasalahan iklim bisa didengar.

CVF pertama kali melakukan pertemuan pada November 2009 di Male, Maladewa diikuti oleh 11 negara yakni Bangladesh, Barbados, Bhutan, Ghana, Kenya, Kiribati, Maladewa, Nepal, Rwanda, Tanzania, dan Vietnam. Sekarang CVF telah berkembang dan memiliki 43 negara anggota.¹³ Fokus utama dari CVF adalah

¹² K. J. Holsti, *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis, Jilid II*, Terjemahan M. Tahrir Azhari, Jakarta: Erlangga, hal. 652-653.

¹³ Climate Vulnerable Forum, *CVF Participating Countries*, diakses dari <https://thecvf.org/web/climate-vulnerable-forum/cvf-participating-countries/> pada 22 Agustus 2017.

memberikan edukasi dan meningkatkan perhatian dunia internasional terhadap isu-isu perubahan iklim yang dapat memberikan dampak buruk bagi negara-negara rentan dan masyarakat global lainnya.

Untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara anggotanya, CVF terus memperjuangkan aturan ambang batas suhu bumi setelah dianggap gagalnya Protokol Kyoto¹⁴¹⁵ untuk menangani permasalahan perubahan iklim. Sebelumnya Protokol Kyoto telah mengesahkan negara-negara maju untuk mengurangi emisi GRK sebesar 5 persen dibanding dengan tahun 1990 untuk periode 2008-2012.¹⁶ Namun aturan tersebut dianggap gagal karena Amerika Serikat tidak meratifikasi perjanjian tersebut, padahal sebagai negara industri dengan pembuangan emisi Karbon yang tinggi, Amerika Serikat akan berperan besar dalam penurunan emisi GRK global. Amerika Serikat menolak meratifikasi Protokol Kyoto karena menganggap kesepakatan tersebut tidak adil mengingat 20 persen penduduk dunia, termasuk China dan India, dibebaskan dari kewajiban menurunkan emisi GRK. Selain itu implementasi Protokol Kyoto hanya akan mengganggu pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat.¹⁷

Lalu upaya lanjutan menghadapi kegagalan Protokol Kyoto ada pada *Copenhagen Accord*, hasil dari pertemuan di COP 15 pada Desember 2009 yang

¹⁴ Tri Wahyuni, *Lima Agenda Besar Tahun 2015* (26/12/2014), CNN Indonesia, diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20141226114554-255-20571/lima-agenda-besar-kesehatan-tahun-2015/> pada 19 April 2017.

¹⁵ Protokol Kyoto merupakan kesepakatan negara Pihak pada tahun 1997 di Kyoto untuk membatasi pembuangan emisi GRK global untuk periode pertama 2005-2012 dan periode kedua 2012-2020.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change*, diakses dari <http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/39/223.bpkp> pada tanggal 19 April 2017.

¹⁷ Daniel Murdiyarso, 2003, *Protokol Kyoto: Implikasinya Bagi Negara Berkembang*, hal. 25.

membahas beberapa butir kesepakatan, salah satunya adalah target stabilisasi emisi GRK di atmosfer yang menetapkan ambang batas suhu bumi pada tahun 2050 adalah 2 derajat Celcius di bawah tingkat masa praindustri. Target tersebut akan dikaji ulang pada tahun 2015, termasuk kemungkinan menurunkan pengurangan emisi GRK menjadi 1,5 derajat Celcius sesuai permintaan negara-negara kepulauan kecil.¹⁸ Aturan ambang batas suhu bumi tersebut yang kemudian diperjuangkan oleh CVF agar aturan mengenai ambang batas suhu bumi yang mereka harapkan berada di tingkat 1,5 derajat Celcius dapat disepakati sebagai rezim baru perubahan iklim UNFCCC.

CVF sebagai negara rentan berupaya agar kebijakan ambang batas suhu bumi 2 derajat Celcius tidak disepakati mengingat dengan rata-rata suhu bumi saat ini di tingkat 1 derajat Celcius telah mengancam kehidupan masyarakat di negara-negara anggota CVF.¹⁹ Upaya CVF agar ditetapkannya ambang batas suhu bumi menjadi 1,5 derajat Celcius dikarenakan semakin terancamnya keberadaan negara mereka dari naiknya permukaan air laut. Gavin Schmidt direktur *Goddard Institute for Space Studies*, NASA menuliskan target suhu 1,5 derajat Celcius penting untuk diadopsi sebagai kesepakatan baru perubahan iklim karena negara-negara kepulauan yang akan terkena dampak paling besar akibat peningkatan permukaan laut. Menurut Schmidt

¹⁸ Ismi Hadad, *Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Prisma: Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi, Perubahan Iklim & Tantangan Peradaban*, 2010, Jakarta, hlm. 18-19.

¹⁹ *Kecaman Negara Kepulauan* diakses dari <http://www.rappler.com/indonesia/114469-blog-konferensi-perubahan-iklim-cop-21> pada 14 September 2017.

untuk menjaga suhu tetap berada pada level 1,5 derajat Celcius dibutuhkan pemotongan emisi Karbon yang signifikan.²⁰

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisa bagaimana **Peran *Climate Vulnerable Forum* (CVF) dalam Memperjuangkan Ambang Batas Suhu Bumi pada Forum UNFCCC** karena peneliti tertarik untuk mengetahui peran CVF dalam memperjuangkan ambang batas suhu bumi 1,5 derajat Celsius dalam forum UNFCCC sejak pembahasan awal mengenai ambang batas suhu bumi dalam deklarasi pembentukan CVF yang kemudian dibawa ke COP 15 (tahun 2009) sampai disepakatinya sebuah kesepakatan bersama di COP 21 (tahun 2015).

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian dengan judul **Peran *Climate Vulnerable Forum* (CVF) dalam Memperjuangkan Ambang Batas Suhu Bumi pada Forum UNFCCC** ini adalah:

Bagaimana peran CVF dalam memperjuangkan ambang batas suhu bumi menjadi 1,5 derajat Celsius pada forum UNFCCC sejak direncanakannya aturan ambang batas suhu di COP 15 hingga disepakatinya sebuah kesepakatan bersama di COP 21?

²⁰ Annisa Hardjanti, *Bumi Alami Percepatan dalam Kenaikan Suhu* (31/08/2016), National Geographic Indonesia diakses dari <http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/08/bumi-alami-percepatan-dalam-kenaikan-suhu> pada tanggal 19 April 2017.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih lanjut peran forum kerjasama internasional (*Climate Vulnerable Forum*) dalam melakukan advokasi pada negara-negara yang terlibat dalam forum UNFCCC untuk menyepakati aturan mengenai ambang batas kenaikan suhu bumi menjadi 1,5 derajat Celsius.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan terhadap perkembangan studi Hubungan Internasional terutama kajian politik lingkungan dan peran forum kerjasama internasional dalam isu non tradisional khususnya isu perubahan iklim global.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak negara maupun non negara yang berupaya membentuk kebijakan mengenai isu perubahan iklim pada forum internasional dalam melakukan advokasi pada negara-negara pembuat kebijakan, serta memberikan informasi bagi masyarakat luas mengenai isu perubahan iklim yang perlu mendapat perhatian global.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama adalah “Penanggulangan Isu Perubahan Iklim: Studi Kasus Peran *Friends of the Earth* dalam Mendorong *Climate Change Act* 2008 di Inggris Melalui Kampanye “*The Big Ask*” (2005-2008)” oleh Lovely Christina Manafe.²¹ Dalam penelitiannya, Manafe mengangkat isu perubahan iklim dengan fokus peran organisasi internasional sebagai pendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang pro lingkungan. Organisasi *Friend of the Earth* yang berkembang di Inggris menjadi variabel yang diteliti oleh Lovely dalam penelitiannya dengan fokus pada kampanye *The Big Ask* oleh *Friends of the Earth*. *The Big Ask* sendiri merupakan kampanye yang melibatkan semua kalangan masyarakat Inggris untuk membujuk pemerintah Inggris mengeluarkan undang-undang mengenai perubahan iklim. Landasan konsep yang digunakan Manafe dalam penelitiannya adalah *Non Governmental Organization* sebagai *global movement* yang fokus terhadap permasalahan perubahan iklim global.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Manafe menunjukkan bahwa NGO seperti *Friends of the Earth* berperan dalam upaya-upaya penanggulangan perubahan iklim. Sebagai NGO, *Friends of the Earth* dapat menuntut pemerintah dan masyarakat untuk melakukan aksi nyata dan menjadi rekan dalam membangun kerangka kerjasama serta mengimplementasikan kerangka kerjasama tersebut. *The Big Ask* dinyatakan berhasil dengan dikeluarkannya *Climate Change Act* yang

²¹ Lovely Christina Manafe, *Peran NGO dalam Penanggulangan Isu Perubahan Iklim: Studi Kasus Peran Friends of the Earth dalam Mendorong Climate Change Act 2008 di Inggris Melalui Kampanye “The Big Ask” (2005-2008)*, (Depok, Universitas Indonesia, 2012) diakses dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20321854-S-Lovely%20Christina%20Manafe.pdf> pada tanggal 5 April 2016.

bertujuan untuk mereduksi emisi karbon yang diproduksi Inggris menjadi 80 persen hingga tahun 2050. *Climate Change Act* ini merupakan undang-undang pertama yang mengatur tentang perubahan iklim pertama di dunia dengan target reduksi emisi yang mengikat. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan Manafe adalah pembahasan mengenai isu *climate change* dan tuntutan masyarakat untuk dibuatnya sebuah kebijakan mengenai *climate change*, namun yang membedakan adalah objek penelitiannya, di mana penulis menggunakan objek forum kerjasama internasional dan Manafe menggunakan *Non Governmental Organization*.

Berikutnya penelitian yang berjudul Efektivitas Peran *Intergovernmental Panel On Climate Change* (IPCC) dalam hal *Policy Making* untuk Menanggulangi Isu Perubahan Iklim oleh Jhen Reski Nugrah Toalla.²² Dengan menggunakan pendekatan organisasi internasional, Toalla mencoba menjawab rumusan masalah dari penelitiannya mengenai peran IPCC dan efektivitas dari IPCC itu sendiri dalam pengambilan kebijakan isu perubahan iklim. IPCC memiliki berbagai kegiatan seperti menyusun laporan penilaian mengenai fenomena ilmiah perubahan iklim dari segi teknis dan sosial ekonomi, penyebab serta dampaknya, dan strategi untuk menanggulangnya. IPCC adalah tempat bagi para pakar, peneliti, dan praktisi untuk menciptakan solusi-solusi yang dapat mengurangi dampak buruk *climate change*.

²² Jhen Reski Nugrah Toalla, *Efektivitas Peran Intergovernment Panel On Climate Change (IPCC) dalam Hal Policy Making untuk Menanggulangi Isu Perubahan Iklim*, (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2013) diakses dari <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/7223/SKRIPSI%20LENGKAP-JHEN%20RESKI%20NUGRAH%20TOALLA.pdf?sequence=1> pada 12 Maret 2017.

Selain itu kegiatan utama IPCC adalah menerbitkan secara berkala *assessment report* mengenai perubahan iklim yang disusun oleh tim peneliti.

Dalam keikutsertaan IPCC di *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) hanya diberikan waktu untuk menyampaikan *assessment report* saja tanpa turut serta dalam proses negosiasi maupun proses pengambilan keputusan dalam UNFCCC. Menurut Toalla, walaupun tidak turut serta dalam pembuatan keputusan, IPCC tetap berperan penting dalam mengatasi dampak perubahan iklim antara lain untuk mengumpulkan dan menilai keputusan ilmiah mengenai perubahan iklim, memberikan informasi ekonomi-sosial, dan memberikan pemahaman teknis yang relevan mengenai risiko, dampak, dan tanggapan perubahan iklim itu sendiri. Kemudian mengenai efektivitas dari peran IPCC sendiri, Jhen mengungkapkan bahwa peran IPCC belum efektif dalam hal pembuatan kebijakan untuk menanggulangi permasalahan dengan alasan:

- a. IPCC hanya membuat laporan berdasarkan penilaian dari literatur yang diterbitkan oleh para ahli, bukan melakukan penelitian ataupun memonitor data iklim terkait.
- b. Laporan yang diterbitkan IPCC hanya menghasilkan kebijakan yang relevan bukan kebijakan yang preskriptif.
- c. IPCC dalam UNFCCC hanya menyampaikan *assessment report* tanpa turut serta dalam proses negosiasi dan pembuatan kebijakan.

Penelitian terdahulu ini menyumbang gagasan mengenai cara badan pemerintahan antar negara seperti IPCC membentuk kebijakan *climate change*

dengan memberikan masukan-masukan pada negara-negara yang mengikuti pertemuan UNFCCC.

Ketiga, penelitian Starlet Rallysa Injaya mengenai Kerjasama Internasional Indonesia dan Jepang: Peran Jepang Terhadap Isu Deforestasi di Indonesia dalam Skema *Asia Forest Partnership* (AFP) Periode 2008-2011.²³ Penelitian ini membahas mengenai permasalahan deforestasi yang sering terjadi di Indonesia dengan cara *illegal logging* dan kebakaran hutan. Untuk menjaga keutuhan hutan, Indonesia turut menandatangani deklarasi *Forest Law Enforcement and Government East Asia Ministerial Conference* yang memiliki tindakan lanjut yakni promosi *Sustainable Forest Management* dengan pembentukan *Asia Forest Partnership* (AFP) yang bertujuan untuk mempromosikan pengelolaan hutan lestari di Asia. Dengan adanya AFP, Indonesia diharapkan mampu mengatasi permasalahan *illegal logging*. Dengan mengangkat permasalahan mengenai bagaimana peran Jepang dalam AFP, khususnya karena adanya peningkatan impor kayu ke Jepang yang terjadi di Kalimantan Timur dan Barat.

Hasil dari penelitian Injaya adalah Indonesia dan Jepang melakukan kerjasama melalui forum AFP telah berhasil menghasilkan kesepakatan antara lain adalah pemberantasan *illegal logging*, pencegahan kebakaran hutan, rehabilitasi lahan terdegradasi, memperhatikan segi ekonomi, sosial dan lingkungan. Sebagai negara

²³ Starlet Rallysa Injaya, *Kerjasama Internasional Indonesia dan Jepang: Peran Jepang Terhadap Isu Deforestasi di Indonesia dalam Skema Asia Forest Partnership (AFP) Periode 2008-2011*, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2013), diakses dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24294/1/Starlet%20Rallysa%20Injaya%20%5BHI-UIN'2006%5D.pdf> pada 13 Maret 2017.

pembeli produk kayu Indonesia, Jepang juga turut menghindari kegiatan *illegal logging* dan harus mengeluarkan peraturan yang melarang perdagangan kayu ilegal. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Injaya adalah objek penelitiannya yakni kerjasama internasional. Jika penulis memfokuskan kerjasama internasional antara beberapa negara yang tergabung dalam *Climate Vulnerable Forum*, Injaya hanya meneliti kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jepang. Selain itu, permasalahan yang diangkat pun sama membahas permasalahan lingkungan.

Penelitian selanjutnya adalah Jurnal Hubungan Internasional dari Khairunnisa dengan judul penelitian Upaya Bangladesh dalam Menanggulangi Ancaman Perubahan Iklim tahun 2009-2015.²⁴ Dalam penelitiannya Khairunnisa meneliti negara Bangladesh yang rentan terhadap perubahan iklim mengingat struktur geografis negaranya yang didominasi oleh dataran rendah. Sebagian besar wilayah Bangladesh berada pada ketinggian kurang dari 12 meter di atas permukaan laut, hal ini membuat Bangladesh rentan terhadap dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim seperti bencana banjir dan bencana lainnya. Untuk menanggulangi ancaman tersebut, pemerintah Bangladesh bekerjasama dengan UNDP pada tahun 2005-2007 dalam kebijakan NAPA (*National Adaptation Programme of Action*) serta melakukan tindakan lanjutan dengan mengeluarkan BCCSAP (*Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan*) pada tahun 2009. BCCSAP sendiri merupakan kebijakan

²⁴ Khairunnisa, *Upaya Bangladesh dalam Menanggulangi Ancaman Prubahan Iklim Tahun 2009-2015*, (eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2016, 4 (1) 001-016, ISSN 2477-2623) diakses dari [http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/10/1%20\(10-31-16-12-45-17\).pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/10/1%20(10-31-16-12-45-17).pdf) pada tanggal 11 April 2017.

yang diadopsi dari *Bali Roadmap* di mana Bangladesh menentang berbagai kegiatan yang dapat membahayakan keamanan makanan, air, energi, dan mata pencaharian masyarakatnya dengan mengangkat visi memberantas kemiskinan dan mencapai sosial ekonomi menengah melalui strategi perubahan iklim pro rakyat miskin yang memprioritaskan kegiatan adaptasi, penanggulangan risiko bencana, pembangunan rendah karbon, mitigasi, transfer teknologi, dan pendanaan.

Menggunakan teori manajemen bencana dan teori pembuatan keputusan, Khairunnisa mengambil kesimpulan bahwa implementasi BCCSAP diikuti dengan kerjasama pemerintah Bangladesh dengan berbagai pihak termasuk *World Bank* dan beberapa negara donatur. Kebijakan tersebut kemudian menghasilkan pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Bangladesh selain sebagai upaya menghadapi ancaman perubahan iklim dan sebagai upaya manajemen bencana alam untuk meminimalisir dampak yang dirasakan oleh masyarakat Bangladesh. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa adalah upaya yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan perubahan iklim karena rentannya kondisi negara tersebut, namun yang membedakan adalah penelitian Khairunnisa dilakukan pada tingkat negara, sedangkan penulis pada tingkat kelompok negara dalam ruang lingkup kerjasama internasional, hal ini menjadikan implementasi dari kebijakan perubahan iklim tersebut diterapkan pada tingkat yang berbeda pula yakni pada negara Bangladesh dan pada masyarakat global.

Penelitian terdahulu terakhir adalah sebuah buku berjudul *Pemanasan Global: Siapakah yang Merasakan Panas* oleh Gerald Foley yang diterjemahkan oleh Hira

Jhamtani.²⁵ Dalam buku ini, Foley menuliskan bagaimana pemanasan global terjadi dan menyebabkan dampak-dampak buruk bagi kehidupan manusia serta cara mengurangi risiko dari pemanasan global. Buku dengan judul asli *Global Warming, Who is Taking the Heat?* Ini bertujuan untuk menyajikan fakta dan argumentasi mengenai pemanasan global dengan memberikan pengetahuan dasar yang diperlukan untuk memahami posisi saat ini dan mengikuti perdebatan tentang pemanasan global di tahun-tahun mendatang. Buku ini menyumbang gagasan mengenai pemanasan global, pendapat para ilmuwan untuk menghadapi pemanasan global di tahun-tahun mendatang, implikasi jika pendapat yang dikemukakan para ilmuwan tersebut benar terjadi, terutama untuk Negara dunia ketiga, langkah-langkah apa yang dapat diambil di seluruh dunia untuk mengurangi risiko pemanasan global, dan implikasi kebijakan bagi Negara dunia ketiga. Hal yang belum dicakup oleh buku ini untuk penelitian yang penulis lakukan adalah proses negosiasi yang dilakukan oleh forum kerjasama internasional dalam pembentukan rezim perubahan iklim.

²⁵ Gerald Foley, 1993, *Climate Change: Who is Taking the Heat? (Terj)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Tabel 1.1 Komparasi Hasil Penelitian

No.	Judul & Peneliti	Jenis Penelitian, Level Analisa, Pendekatan	Hasil Penelitian
1	(SKRIPSI) Peran NGO dalam Penanggulangan Isu Perubahan Iklim: Studi Kasus Peran <i>Friends of the Earth</i> dalam Mendorong <i>Climate Change Act</i> 2008 di Inggris Melalui Kampanye "The Big Ask" (2005-2008) oleh Lovely Christina Manafe	Jenis Penelitian: Deskriptif Landasan Konsep: NGO	<i>Friends of the Earth</i> sebagai sebuah NGO berperan dalam penanggulangan dampak perubahan iklim dengan melakukan tuntutan pada pemerintah dan masyarakat untuk melakukan aksi nyata serta membangun dan melaksanakan kerangka kerjasama untuk kasus perubahan iklim. Upaya yang dilakukan <i>Friends of the Earth</i> melalui kampanye <i>The Big Ask</i> menghasilkan <i>Climate Change Act</i> 2008 yang membuat Inggris harus melakukan penanggulangan perubahan iklim.
2	(SKRIPSI) Efektivitas Peran <i>Intergovernment Panel On Climate Change</i> (IPCC) dalam Hal <i>Policy Making</i> untuk Menanggulangi Isu Perubahan Iklim oleh Jhen Reski Nugrah Toalla	Jenis Penelitian: Deskriptif-Analitis Landasan Konsep: OAI	Keefektifan peran IPCC dalam hal pembuatan kebijakan dianggap belum efektif dikarenakan beberapa alasan, antara lain karena IPCC tidak melakukan penelitian ataupun monitoring langsung data iklim terkait, namun hanya menerbitkan laporan berdasarkan penilaian dari literatur ilmiah yang diterbitkan oleh para ahli.
3	(SKRIPSI) Kerjasama Indonesia dan Jepang: Peran Jepang Terhadap Isu Deforestasi di Indonesia dalam Skema <i>Asia Forest Partnership</i> (AFP) Periode 2008-2011 oleh Starlet Rallysa	Metode Penelitian: Deskriptif Analitis Konsep: Kerjasama Internasional, Kepentingan Nasional, dan Pendekatan <i>Green Thought</i>	Kerjasama antara Indonesia dan Jepang melalui forum AFP berhasil menghasilkan kesepakatan untuk memberantas <i>illegal logging</i> , pencegahan kebakaran hutan, rehabilitasi lahan terdegradasi, memperhatikan segi ekonomi, sosial dan lingkungan. Sebagai negara pembeli produk kayu Indonesia, Jepang turut menghindari kegiatan <i>illegal logging</i> dan harus

	Injaya		mengeluarkan peraturan yang melarang perdagangan kayu ilegal.
4	(JURNAL) Upaya Bangladesh dalam Menanggulangi Ancaman Perubahan Iklim Tahun 2009 – 2015 oleh Khairunnisa	Metode Penelitian: Deskriptif Landasan Teori: Manajemen Bencana dan Pembuatan Keputusan	Terdapat enam pilar utama BCCSAP yakni keamanan pangan, proteksi sosial dan kesehatan, manajemen bencana yang komprehensif, infrastruktur, manajemen riset dan pengetahuan, pembangunan kegiatan mitigasi dan rendah karbon, serta peningkatan kapasitas intuisi pemerintah, swasta, dan sosial dalam melakukan aksi menghadapi perubahan iklim. Implementasi kebijakan dilakukan melalui upaya internal dan eksternal, seperti membentuk badan keuangan untuk mengelola dana mendukung implementasi kebijakan tersebut dan menjalin kerjasama dengan <i>World Bank</i> untuk menampung dana sumbangan dari negara pendonor.
5	(BUKU) Pemanasan Global: Siapakah Yang Merasakan Panas? oleh Gerald Foley, diterjemahkan oleh Hira Jhamtani.		Pada bab 1 buku ini menjelaskan fakta-fakta mengenai pemanasan global. Kemudian di bab 2 dituliskan pendapat para ilmuwan untuk tahun-tahun mendatang menghadapi pemanasan global. Di bab 3 membahas implikasi jika pendapat yang dikemukakan para ilmuwan tersebut benar terjadi, terutama untuk Negara dunia ketiga. Pada bab 4 dijelaskan langkah-langkah apa yang dapat diambil di seluruh dunia untuk mengurangi risiko pemanasan global. Dan terakhir pada bab 5 membahas implikasi kebijakan bagi Negara dunia ketiga.

1.5 Landasan Teori / Konsep

1.5.1 *International Environmental Regime*

Stephen D. Krasner mendefinisikan rezim internasional sebagai seperangkat aturan-aturan, norma, prinsip, dan prosedur pengambilan keputusan di mana harapan dari aktor-aktor yang terlibat di dalamnya difokuskan pada satu area tertentu dalam hubungan internasional.²⁶ Suatu rezim internasional terbentuk karena adanya kepentingan bersama oleh negara-negara pembentuk rezim tersebut. Kesamaan kepentingan kemudian diwujudkan dalam bentuk perjanjian-perjanjian antar negara.

Rezim internasional diharapkan dapat mengatur perilaku negara pada suatu isu tertentu yang kemudian akan memberikan keuntungan bagi dunia internasional. Namun dengan syarat bahwa negara-negara yang bergabung dalam suatu rezim bergerak atas kemauan sendiri bukan paksaan dari pihak lain. Rezim yang kuat akan tercipta jika dilatarbelakangi oleh komitmen dari negara-negara yang bergabung untuk mentaati prinsip, norma, dan aturan-aturan yang telah disepakati bersama pada saat pembentukan rezim tersebut. Tujuan adanya rezim itu sendiri adalah untuk memberikan wadah bagi aktor-aktor tersebut untuk membuat suatu kesepakatan yang tentunya bertujuan untuk memenuhi kepentingan aktor yang ada di dalamnya.²⁷

Pada perkembangannya, rezim internasional berkembang menjadi berbagai macam rezim salah satunya adalah rezim lingkungan internasional. Rezim lingkungan

²⁶ Stephen D. Krasner, "Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables." *International Regimes*, New York: Cornell University Press, 1983, hlm. 2 dalam Evelyn Adisa, 2012, *Rezim Non-Proliferasi Nuklir Internasional dan Program Nuklir Iran* (Tesis), Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 12.

²⁷ Yanuar Ikbar, 2014, *Metodologi & Teori Hubungan Internasional*, Bandung: PT. Reflika Aditama, hal. 280.

hadir untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan-kebijakan mengenai masalah lingkungan global yang kemudian melibatkan negara-negara terlibat untuk mematuhi rezim tersebut. Proses negosiasi politik dalam lingkup multilateral untuk membentuk sebuah rezim internasional dapat dilakukan dengan tahap:²⁸

1. *Issue definition*. Pada tahap ini isu yang ingin diangkat dikenalkan kepada masyarakat global dengan melakukan identifikasi ruang lingkup dan besarnya ancaman, penyebab utamanya, serta tindakan internasional yang diperlukan untuk menanggapi isu tersebut. Pada tahap ini, isu dapat diajukan pada agenda lingkungan internasional oleh satu atau lebih aktor negara.
2. *Fact finding* merupakan proses mediasi yang membawa pihak-pihak berkepentingan untuk menetapkan kesepakatan, memperjelas pemahaman masalah, dan kemungkinan pilihan kebijakan untuk tindakan internasional berdasarkan fakta-fakta ilmiah.
3. *Bargaining on regime creation*. Pada tahap *bargaining*, negara yang memiliki kepentingan pada isu yang diangkat mengajukan proposal untuk tindakan internasional. Keseriusan masalah yang diangkat akan dibahas pada tahap ini dengan adanya pilihan-pilihan kebijakan yang bisa diambil. Koalisi internasional mulai terbentuk untuk mendukung atau menolak kebijakan yang akan diambil tersebut.

²⁸ Gareth Portet & Janet Welsh Brown, *Global Environmental Politics*, 1991, United State of America: Westview Press, dalam Septian Nur Yekti, 2016, *Politik Lingkungan*, disampaikan dalam mata kuliah Politik Lingkungan pada 7 April 2016.

4. *Regime strengthening*. Proses ini merupakan proses *bargaining* lebih lanjut yang menggambarkan upaya negara terkait masalah lingkungan yang diangkat dan disesuaikan dengan kepentingannya.

Dalam proses pembentukan rezim tidak lepas dari peran aktor negara dan non-negara sebagai kelompok penekan (*pressure group*) dan kelompok pemegang kepentingan (*interest group*). Aktor negara dalam proses pembentukan rezim juga memainkan peran sebagai *Lead State*, *Supporting State*, *Swing State*, dan *Veto State*.²⁹ Dalam analisa peran CVF sebagai kerjasama negara-negara untuk membentuk rezim perubahan iklim di UNFCCC, CVF berperan sebagai *Lead State*, di mana CVF memiliki komitmen yang kuat terhadap upaya global terhadap permasalahan perubahan iklim dengan melakukan upaya advokasi pada aktor-aktor negara untuk menetapkan aturan ambang batas suhu bumi dalam rezim baru perubahan iklim UNFCCC.

Upaya yang dilakukan oleh *Lead State* dalam mempengaruhi aktor negara-negara pengambil kebijakan adalah:³⁰

1. Menunjukkan urgensi masalah dengan menghasilkan atau memperhatikan penelitian ilmiah yang menunjukkan pentingnya permasalahan tersebut.
2. Membuat opini publik di negara sasaran.
3. Mengambil tindakan sepihak untuk mengatasi permasalahan.

²⁹ Gareth Portet & Janet Welsh Brown, *Global Environmental Politics*, 1991, United State of America: Westview Press, dalam Septian Nur Yekti, 2016, *Politik Lingkungan*, disampaikan dalam mata kuliah Politik Lingkungan pada 7 April 2016.

³⁰ *Ibid*, dalam Septian Nur Yekti, 2016, *Politik Lingkungan*, disampaikan dalam mata kuliah Politik Lingkungan pada 7 April 2016.

4. Menggunakan pengaruh diplomatik untuk mendapatkan dukungan organisasi internasional agar memprioritaskan permasalahan tersebut.
5. Mencari dukungan masyarakat global untuk mendukung posisi mereka di negara lain atau konferensi internasional.
6. Membuat pemisah diplomatik bagi negara yang tidak terikat atau mengancam peran veto.

Penulis menggunakan rezim internasional dengan fokus pada permasalahan rezim lingkungan, dalam hal ini rezim yang dimiliki oleh UNFCCC untuk mengatur negara Pihak terkait maraknya isu perubahan iklim yang perlu mendapatkan perhatian oleh masyarakat global. Dengan adanya sebuah rezim yang mengatur permasalahan perubahan iklim, masyarakat khususnya masyarakat di negara yang rentan dapat merasa aman menghadapi laju perubahan iklim global. Konsep ini akan menjadi landasan dalam menganalisa peran CVF sebagai negara rentan yang berupaya memasukkan aturan ambang batas suhu bumi di tingkat 1,5 derajat Celcius dalam rezim baru perubahan iklim UNFCCC. Tahapan dan upaya yang CVF lakukan sebagai *lead state* dalam pembentukan rezim perubahan iklim UNFCCC akan dianalisa menggunakan tahapan dan upaya yang telah disebutkan sebelumnya.

1.5.2 Politik Hijau

Isu lingkungan saat ini menjadi salah satu fokus internasional dikarenakan permasalahan lingkungan dapat menjadi permasalahan yang krusial bagi manusia. Salah satu penyebab permasalahan lingkungan adalah kegiatan perekonomian global yang melakukan eksploitasi sumber daya alam atau penggunaan energi fosil

berlebihan untuk memenuhi kebutuhan industri. Pada awalnya kajian hubungan internasional hanya terpaku pada kegiatan manusia sebagai perwakilan dari negara. Akan tetapi para kaum environmentalisme melihat pandangan yang lain dalam kajian hubungan internasional yaitu kegiatan manusia yang berdampak pada terganggunya kelestarian alam dan lingkungan. Hal tersebut yang kemudian memunculkan teori Politik Hijau dalam ilmu Hubungan Internasional.

Politik Hijau merupakan sebuah aksi yang menolak modernitas dengan produk industrialisasinya karena dianggap menyebabkan permasalahan lingkungan yang semakin parah. A. Dobson mendefinisikan Politik Hijau sebagai sebuah pandangan yang menolak pandangan antroposentrisme sebagaimana pandangan yang diungkapkan oleh R. Eckersley³¹, serta memberikan batasan (pertumbuhan) untuk meminimalisir terjadinya krisis lingkungan secara alami.³²

Terdapat dua macam gerakan lingkungan yang dibedakan menjadi gerakan lingkungan radikal dan gerakan lingkungan reformis.³³ Gerakan lingkungan reformis mencoba memperbaiki sistem kapitalisme menjadi lebih baik sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan. Mereka menganut paham teknosentrisme³⁴ serta

³¹ Politik Hijau menurut R. Eckersley memiliki karakter yang bertolakbelakang dengan pandangan antroposentrisme, di mana Politik Hijau menempatkan kebebasan nilai pada seluruh ekosistem dan seluruh aspek kehidupan.

³² John Barry, *Green Political Theory and The State, Discursive Sustainability; The State (and citizen) of Green Political Theory*, diakses dari <http://www.psa.ac.uk/cps/1994/barr.pdf> dalam Apriawan, 2011, *Teori Hijau: Sebuah Alternatif dalam Perkembangan Hubungan Internasional*, Multiversa Journal of International Studies, hal. 46 diakses dari [http://repository.unand.ac.id/17653/1/Vol.02_No.01_2011_\(Apriawan\).pdf](http://repository.unand.ac.id/17653/1/Vol.02_No.01_2011_(Apriawan).pdf) pada 7 Maret 2017.

³³ David Pepper, *Environmentalism*, dalam Gary Brownig, etc (ed), *Understanding Contemporary Society*, dalam Apriawan, *Ibid*, hal. 42

³⁴ Teknosentrisme merupakan paham yang meyakini bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan manajemen ekosistem yang rasional adalah jalan penyelesaian bagi permasalahan lingkungan.

mempertanyakan keterlibatan negara dalam ekonomi pasar. Sedangkan gerakan lingkungan radikal melihat permasalahan lingkungan dari akarnya dan memiliki pandangan bahwa perlu adanya perubahan yang fundamental, seperti agenda rekonstruksi kapitalisme sehingga perdebatan lingkungan di tengah gerakan lingkungan radikal berada pada tingkat politis-struktural.³⁵

Bagi kaum neoliberal isu lingkungan merupakan isu global yang dapat mempengaruhi permasalahan-permasalahan global lainnya. John Barry menyatakan bahwa Politik Hijau dapat mempengaruhi sistem pemerintahan global karena memiliki prinsip distribusi keadilan, berkomitmen pada demokratisasi, dan proses pencapaian keberlangsungan ekologi.³⁶ Pada perkembangan Politik Hijau, Tim Hayward memandang bahwa manusia merupakan bagian dari ekosistem sehingga berdampak pada perilaku politiknya.³⁷ Oleh karena itu kebijakan politik yang diambil harus diselaraskan dengan teori lingkungan untuk menyelaraskan kehidupan manusia dengan ekosistem.

Terdapat 10 prinsip dalam Politik Hijau yang menjadi dasar dan tujuan pada proses penyampaian kebijakan politik, antara lain:³⁸

³⁵ Apriwan, *Ibid*, hal. 44.

³⁶ John Barry, Green Political Theory and The State “Discursive Sustainability; The State (and citizen) of Green Political Theory, diakses dari <http://www.psa.ac.uk/cps/1994/barr.pdf> dalam Apriwan, *Ibid*, hal. 45.

³⁷ Tim Hayward, Green Political Theory, University of Edinburgh, diakses dari <http://www.psa.ac.uk/cps/1996/hayw.pdf> dalam Apriwan, *Ibid*, hal. 41.

³⁸ Apriwan, *Ibid*, hal. 47-50.

1. Kesadaran dan keberlangsungan ekologi

Manusia harus bertindak berdasarkan pemikiran bahwa ia merupakan bagian dari alam, bukan memiliki posisi di atas alam. Oleh karena itu, manusia perlu untuk menyelaraskan kegiatannya dengan ekosistem.

2. Demokrasi akar rumput

Demokrasi dalam pendekatan Politik Hijau perlu dilakukan dari tingkat “akar rumput” yang berarti diterapkan dari tingkat masyarakat lokal. Setiap manusia berhak untuk berpendapat mengenai keputusan yang berpengaruh bagi kehidupan mereka.

3. Keadilan sosial dan persamaan kesempatan

Semua orang memiliki hak dan kesempatan yang sama atas sumber daya yang berasal dari masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, hambatan-hambatan sosial dalam memperoleh hak dan kesempatan tersebut harus dihilangkan dengan adanya peraturan yang terikat hukum.

4. Anti kekerasan

Kebiasaan masyarakat untuk menggunakan kekerasan dalam penyelesaian masalah dianggap tidak benar, untuk mempertahankan diri pada situasi yang terdesak dapat dilakukan dengan tindakan non-kekerasan.

5. Desentralisasi

Politik Hijau mendukung upaya restrukturisasi institusi politik, sosial, dan ekonomi yang dikuasai oleh orang-orang tertentu. Pengambilan keputusan harus dilakukan pada tingkat individu atau lokal.

6. Ekonomi berbasis komunikasi dan berkeadilan

Penerapan sistem ekonomi yang berkelanjutan dapat menciptakan lapangan kerja dan standar hidup yang baik tanpa mengabaikan keseimbangan ekosistem.

7. Feminisme

Politik Hijau menghormati perbedaan pendapat dan *gender*.

8. Penghormatan terhadap keragaman

Adanya keyakinan mengenai pentingnya keragaman budaya, etnis, ras, dan agama. Perbedaan-perbedaan yang ada tersebut juga harus tercermin dalam badan atau organisasi pengambil keputusan.

9. Tanggung jawab personal dan global

Adanya dukungan bagi tindakan individu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup selama tindakan tersebut tidak mengabaikan keseimbangan ekosistem dan harmoni sosial.

10. Fokus pada masa depan dan berkelanjutan

Tindakan dan kebijakan yang diambil berdasarkan pandangan Politik Hijau memiliki tujuan jangka panjang. Mereka berjuang dalam perlindungan SDA, mengembangkan ekonomi berkelanjutan, dan membuat peraturan yang turut memperhatikan ekosistem. Hal ini dikarenakan kebijakan atau tindakan yang diambil saat ini ikut bertanggung jawab terhadap generasi yang akan datang.

Dari berbagai pendapat para ahli tersebut maka penulis akan menggunakan Politik Hijau sebagai salah satu landasan berpikir penulis dalam menganalisa penelitian ini. Penulis menggunakan Politik Hijau dalam meninjau upaya yang CVF ambil sebagai gerakan lingkungan reformis karena CVF mencoba memperbaiki sistem yang telah ada agar lebih efektif memerangi perubahan iklim, yakni menambahkan aturan ambang batas suhu bumi 1,5 derajat Celcius untuk memperbaiki rezim sebelumnya. CVF menganut prinsip-prinsip Politik Hijau dalam proses penyampaian kebijakan politik sesuai dengan kepentingan mereka dalam forum UNFCCC yaitu, kesadaran dan keberlangsungan ekologi, demokrasi akar rumput, anti kekerasan, dan fokus pada masa depan dan berkelanjutan. Kemudian sesuai dengan definisi Politik Hijau menurut A. Dobson, CVF memperjuangkan aturan ambang batas suhu bumi 1,5 derajat Celcius untuk meminimalisir risiko krisis lingkungan yang akan terjadi jika suhu bumi berada di tingkat 2 derajat Celcius.

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian mengenai **Peran *Climate Vulnerable Forum* (CVF) dalam Memperjuangkan Ambang Batas Suhu Global pada Forum UNFCCC** adalah *International Environmental Regime* dan Politik Hijau.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Variabel Penelitian

Terdapat dua variabel yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yakni:

Unit Analisa: *Climate Vulnerable Forum* (CVF) yang merupakan kelompok negara sebagai variabel dependen dan obyek penelitian.

Unit Eksplanasi: Aturan ambang batas suhu bumi pada forum UNFCCC yang merupakan sistem politik lingkungan internasional sebagai variabel independen yang mempengaruhi unit analisa.

Dari dua variabel yang terdapat dalam penelitian ini maka tingkat analisa yang digunakan adalah Induksionis karena unit eksplanasi dari penelitian ini lebih tinggi dari unit analisa.

1.6.2 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian eksplanatif, di mana penelitian tersebut merupakan penelitian yang bertujuan untuk menerangkan atau menguji hipotesis dari variabel-variabel penelitian.³⁹ Penelitian eksplanatif berupaya mengetahui apakah terdapat hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Dalam penelitian ini penulis berusaha mencari tahu apakah CVF mempengaruhi aturan ambang batas suhu bumi di UNFCCC.

³⁹ S. Singarimbun, 1981, *Metode Penelitian Survei*, Yogyakarta: UGM Press diakses dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/127612-T%2026403-Pengaruh%20motivasi-Metodologi.pdf> pada 25 November 2017.

1.6.3 Metode Analisis

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *library research*.⁴⁰ *Library research* berarti penulis memperoleh data dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta sumber berita dari media internet. Selain itu penulis juga memperoleh data melalui publikasi-publikasi yang diperoleh dari situs resmi *Climate Vulnerable Forum* dan UNFCCC berupa pernyataan, *press release*, *campaign reports*, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kajian penulis. Data-data yang berhasil diperoleh kemudian dikaji ulang sehingga mampu menjelaskan keadaan yang penulis butuhkan sesuai dengan isu yang diteliti.

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.4.1 Batasan Waktu

Batasan waktu yang penulis gunakan dalam penelitian ini sejak pembentukan *Climate Vulnerable Forum* pada November 2009 sampai disepakatinya kesepakatan bersama UNFCCC di pertemuan COP 21 Paris pada tahun 2015. Batasan waktu ini penulis ambil untuk melihat peran CVF sejak awal aturan mengenai ambang batas suhu bumi dideklarasikan pada pertemuan pertama CVF dan direncanakan sebagai rezim baru perubahan iklim dalam pertemuan COP 15 pada tahun 2009 hingga akhirnya disepakati di COP 21 pada tahun 2015.

⁴⁰ Bungaran Antonius Simanjutak dan Soedjito Sosrodiharjo, 2014, *Metode Penelitian Sosial* (Edisi Revisi), Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal. 8-9 diakses dari https://books.google.co.id/books?id=F3BsDAAAQBAJ&pg=PA13&dq=metode+deduktif+penelitian+sosial&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=snippet&q=deduktif&f=false pada 2 Mei 2017.

1.6.4.2 Batasan Materi

Batasan materi dari penelitian ini adalah hal-hal mengenai perubahan iklim global beserta dampaknya bagi negara-negara yang rentan terhadap perubahan iklim khususnya ancaman tenggelam karena naiknya permukaan air laut dan risiko menjadi pengungsi iklim, serta peran dari kerjasama internasional *Climate Vulnerable Forum* dalam membentuk rezim perubahan iklim UNFCCC mengenai ambang batas suhu bumi.

1.7 Hipotesa

Melalui teori *international environmental regime* yang digunakan dalam penelitian ini, *Climate Vulnerable Forum* (CVF) sebagai sebuah forum kerjasama internasional dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara rentan dalam proses pembentukan rezim perubahan iklim berperan sebagai *lead state*. Tahapan-tahapan yang dilalui CVF dalam proses pembentukan rezim adalah *issue definition*, *fact finding*, *bargaining on regime creation*, dan *regime strengthening*. Tahapan tersebut telah dilalui CVF sejak pertemuan UNFCCC di COP 15 hingga disepakatinya kesepakatan bersama mengenai ambang batas suhu bumi di COP 21. Dalam menjalankan perannya sebagai *lead state*, CVF memberikan batasan untuk meminimalisir terjadinya krisis lingkungan secara alami sebagaimana yang diungkapkan oleh A. Dobson dalam teori Politik Hijau. Batasan yang mereka berikan adalah ambang batas suhu bumi di tingkat 1,5 derajat Celcius agar bumi terhindar dari pemanasan global yang dapat mengancam kehidupan masyarakat global, khususnya masyarakat yang berada di negara-negara rentan perubahan iklim.

Dalam proses penyampaian kebijakan politiknya, CVF menganut beberapa prinsip Politik Hijau antara lain prinsip kesadaran dan keberlangsungan ekologi, demokrasi akar rumput, anti kekerasan, dan fokus pada masa depan dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan kepentingan CVF pada forum UNFCCC mengenai ambang batas suhu bumi yang telah memperhatikan keseimbangan lingkungan, hak dan kesempatan masyarakat, kebebasan berpendapat bagi masyarakat yang menginginkan ambang batas suhu bumi di tingkat 1,5 derajat Celcius, penyelesaian konflik tanpa menggunakan kekerasan di tingkat global, serta penerapan kebijakan yang memiliki tujuan jangka panjang bagi kehidupan masyarakat generasi sekarang, generasi yang akan datang, dan bagi lingkungan.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian dengan judul **Peran *Climate Vulnerable Forum* (CVF) dalam Memperjuangkan Ambang Batas Suhu Bumi pada Forum UNFCCC** ini terdiri dari lima bab.

Pada Bab I akan berisi gambaran penelitian secara keseluruhan mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan landasan teori, serta metodologi penulisan yang digunakan.

Pada Bab II akan berisi penjelasan mengenai perubahan iklim dan dampak yang akan ditimbulkan serta tanggung jawab masyarakat global yang akan dispesifikkan menjadi tanggung jawab di bawah UNFCCC. Tahapan awal keterlibatan *Climate Vulnerable Forum* (CVF) di UNFCCC dalam mengupayakan aturan ambang batas suhu bumi menjadi 1,5 derajat Celcius karena urgensi ambang

batas suhu bumi tersebut bagi negara-negara anggota CVF sehingga perlu disepakati sebagai sebuah kesepakatan yang mengikat para Pihak di bawah UNFCCC juga akan dijelaskan pada bab ini. Tahap tersebut adalah *issue definition* dan *fact finding*.

Pada Bab III akan berisi tahap lanjutan yang dilakukan CVF dalam proses pembentukan rezim perubahan iklim khususnya kepentingan CVF mengenai aturan ambang batas suhu bumi 1,5 derajat Celcius yakni tahap *bargaining on regime creation* dan *regime strengthening*. Selain itu upaya yang CVF lakukan sebagai *lead state* dalam menjalankan tahapan-tahapan pembentukan rezim tersebut juga akan dijelaskan pada bab ini.

Bab IV berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian serta saran akademis dan praktis. Secara singkat sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 1.2 Sistematika Penulisan

BAB I	PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian 1.3.2.1 Manfaat Akademis 1.3.2.2 Manfaat Praktis 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Landasan Teori / Konsep 1.5.1 <i>International Environmental Regime</i> 1.5.2 Politik Hijau 1.6 Metodologi Penelitian 1.6.1 Variabel Penelitian 1.6.2 Metode / Tipe Penelitian 1.6.3 Metode Analisis 1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 1.6.4.1 Batasan Waktu 1.6.4.2 Batasan Materi 1.7 Hipotesa 1.8 Sistematika Penulisan
BAB II	PERUBAHAN IKLIM GLOBAL DAN DAMPAKNYA BAGI CVF 2.1 Penanganan Perubahan Iklim di bawah UNFCCC 2.2 Keterlibatan CVF di UNFCCC 2.3 Tahap Awal CVF dalam Mengupayakan Aturan Ambang Batas Suhu Bumi
BAB III	UPAYA CVF AGAR ISU AMBANG BATAS SUHU BUMI MENJADI KESEPAKATAN NEGARA PIHAK UNFCCC 3.1 Tahapan Lanjutan Pembentukan Rezim UNFCCC yang dilakukan CVF 3.2 Upaya CVF sebagai <i>Lead State</i> pada Proses Pembentukan Rezim Perubahan Iklim UNFCCC
BAB IV	PENUTUP 4.1 Kesimpulan 4.2 Saran